

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional suatu daerah maupun organisasi. Seseorang yang memegang posisi Manajerial diharapkan mampu menghasilkan Kinerja Manajerial yang berbeda dengan Kinerja pegawai. (*Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.)

UU Otonomi Khusus Papua berdampak pada pemberian wewenang lebih besar pada provinsi dalam hal keuangan. Kebijakan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Nabire, baik dari dana perimbangan maupun dana otonomi khusus menduduki porsi cukup besar bila dibanding dengan rata-rata Provinsi di Indonesia. Kebijakan pembangunan Kabupaten Nabire diarahkan pada amanat yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus yaitu berkaitan dengan empat sektor prioritas: sektor pendidikan, sektor kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka dituntut suatu proses perencanaan program dan anggaran yang baik serta didukung oleh kualitas kinerja aparat pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang memadai, sehingga diharapkan terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kompas.com, (2016).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah peraturan yang esensial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman teknis yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menekankan pada pentingnya penyusunan anggaran yang jelas dan terukur untuk memudahkan evaluasi kinerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah standar yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang juga diterapkan pada keuangan daerah. Aturan-aturan ini memberikan kerangka hukum yang kuat dan mendukung penelitian ini dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah aspek penting yang mempengaruhi kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Nabire.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya.

Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak

bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. (BPK RI, 2020)

Berdasarkan realita yang terdapat pada laporan keuangan Kabupaten Nabire di mana berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. (BPK RI, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kinerja manajerial organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Nabire tahun 2020, BPK RI menemukan sejumlah permasalahan yang signifikan. Pemeriksa BPK mengidentifikasi kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.

1. **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI):** Sistem pengendalian yang tidak efektif dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan dan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pengawasan internal di Kabupaten Nabire perlu diperkuat untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.
2. **Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:** BPK menemukan bahwa beberapa transaksi keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penggunaan dana yang tidak tepat dan prosedur pengadaan yang tidak sesuai. Ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan risiko sanksi administratif dan mengurangi kredibilitas pemerintah daerah.
3. **Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan:** Adanya salah saji dalam pengakuan, pengukuran, klasifikasi, atau pengungkapan transaksi mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan tidak akurat. Kesalahan ini dapat mempengaruhi keandalan dan kepercayaan terhadap laporan keuangan.
4. **Kecukupan Pengungkapan:** Pengungkapan yang tidak memadai dalam laporan keuangan mengurangi informasi yang diperlukan bagi pengguna laporan untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam transparansi dan detail informasi yang disajikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan perhatian khusus dan tindakan perbaikan yang segera untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD di Kabupaten Nabire, serta memberikan

rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. (BPK RI, 2020)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial adalah Akuntabilitas, (Sisdyani,2019). Akuntabilitas publik pada pemerintah akan membantu masyarakat untuk mengetahui rencana anggaran, penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan dan program yang terjadi di pemerintah, sehingga pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pernyataan diatas di perkuat oleh (Solina,2014) dengan judul Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial (Pada SKPD Tanjung Pinang). Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial, selanjutnya partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hasil penelitian diatas didukung oleh penelitian (Sari, 2018). Hasil penelitian menemukan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, hasil juga menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Selain itu (Wulandari, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan tugas, semakin baik kinerja manajerial yang dicapai.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah kejelasan sasaran anggaran (Sisdyani,2019). Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membantu manajer

untuk mendapatkan informasi mengenai kegagalan dan keberhasilan pemerintah, sehingga manajer akan dapat menentukan tujuan anggaran dengan jelas dan spesifik.

Pernyataan diatas di perkuat oleh Widiyastuti (2016) yang menjelaskan bahwa terdapat Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap kinerja manajerial. kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik memudahkan pemerintah menyusun rencana kerja dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah. Hal ini di dukung oleh konsep kejelasan sasaran anggaran pada *Goal Setting Theory* yaitu dimana seseorang yang memahami tujuan dan sasaran yang jelas akan berpengaruh pada perilaku kerjanya

Namun hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2019) dengan judul Penelitian pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Faktor ketiga yang dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial adalah partisipasi penyusunan anggaran. (Adiputra,2021) partisipasi anggaran akan meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Manajer yang ikut terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran akan membentuk sikap dan sifat yang positif karena manajer akan merasa dihargai dan puas terhadap pekerjaannya.

Hasil penelitian (Sujana,2021). Menjelaskan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Hasilnya menunjukan bahwa Akuntabilitas, kejelasan

sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : Pertama, di mana fenomena yang di dapat berdasarkan hasil audit BPK masih ada permasalahan pada pemerintah daerah yang masih belum taat terhadap aturan dan juga minimnya kompetensi yang di miliki pada SDM dalam pengelolaan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang di rencanakan sehingga kejelasan sasaran anggarannya tidak tercapai. Kedua, penelitian terdahulu melakukan penelitian di OPD Kota Denpasar dengan variable penelitian Akuntabilitas(X1), Kejelasan sasaran anggaran(X2), Partisipasi anggaran(X3) dan Kinerja Manajerial(Y). (Eka Ardhani Sisdyani, 2019) sedangkan penelitian ini dilakukan di OPD Kabupaten Nabire. Ketiga, penelitian ini sebelumnya dilakukan ditahun 2019 dan penelitian ini dilakukan ditahun 2024.

Motivasi peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah berangkat dari fenomena yang terjadi di hampir 13 OPD berdasarkan LHP Audit BPK tahun 2020 di Kabupaten Nabire. Selain itu pada hasil Penelitian-Penelitian empiris diatas terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang sebelumnya yang sebenarnya adalah *research gap* (kesenjangan penelitian) yang oleh Agusty, (2006) disebutkan bahwa *research gap* tersebut dapat atau seharusnya dikembangkan sebagai masalah penelitian yang perlu di inventigasi lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan topik Penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Pada Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nabire.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire?
4. Apakah akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire.
2. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire.
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran Secara Simultan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Nabire

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah yang dapat meningkatkan kinerja dinas, kantor maupun badan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nabire.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bagi para akademisi adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti yang tertarik dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lain di masa yang akan datang, serta memberikan informasi faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pada pemerintah daerah Kabupaten Nabire.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca untuk melihat dan mengetahui pembahasan pada penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu sistematika penulisan dari penelitian ini. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian pustaka, riset sebelumnya dan pengembangan hipotesis serta kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan riset dimana peneliti harus menjelaskan beberapa hal

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai karakteristik responden, validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan diskusi atau pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan simpulan dan saran